

Membangun Ketahanan Nasional Melalui Penerapan *Rule Of Law* dan Konstitusi Nasional

Farah Izzati Najlaa¹, Misya Lova Haqsyia², Choyrunisa Cahya Assago³,
Maulia Depriya Kembara⁴

¹⁻⁴ Departemen Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Pendidikan Indonesia

Korespondensi penulis : farahnajlaa46@upi.edu¹, misyalova@upi.edu², choyrunisacahya2409@upi.edu³,
maulia@upi.edu⁴

ABSTRACT: *The implementation of the rule of law and the national constitution play an important role in building strong and sustainable national resilience. This research aims to provide an in-depth understanding to the younger generation about the crucial role of the rule of law and the national constitution in building a solid state foundation. The method used was a qualitative approach and in-depth interviews with 18 student respondents to understand their views on the rule of law and the national constitution. The interview results show that the younger generation realizes the importance of knowledge about the rule of law and the national constitution in preventing corruptive behavior, fighting for justice, and protecting individual rights. The implementation of the rule of law and the national constitution is key in building strong national resilience, so a solid understanding of these legal principles is crucial for the younger generation as future leaders. With a strong legal awareness, the younger generation is expected to become agents of change that strengthen national resilience through active participation and advocacy for the principles of democracy and human rights.*

Keywords: *National Resilience, Rule of Law, National Constitution*

ABSTRAK: Penerapan rule of law dan konstitusi nasional memiliki peran penting dalam membangun ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada generasi muda tentang peran krusial rule of law dan konstitusi nasional dalam membangun fondasi negara yang kokoh. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam terhadap 18 responden mahasiswa dan siswa untuk memahami pandangan mereka terhadap rule of law dan konstitusi nasional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa generasi muda menyadari pentingnya pengetahuan tentang rule of law dan konstitusi nasional dalam mencegah perilaku koruptif, memperjuangkan keadilan, dan melindungi hak-hak individu. Penerapan rule of law dan konstitusi nasional menjadi kunci dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh, sehingga pemahaman yang mumpuni tentang prinsip-prinsip hukum ini sangat penting bagi generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. Dengan kesadaran hukum yang kuat, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat ketahanan nasional melalui partisipasi aktif dan advokasi untuk prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kata kunci: Ketahanan Nasional, Rule of Law, Konstitusi Nasional

PENDAHULUAN

Ketahanan nasional merupakan pilar utama dalam menjaga kestabilan, keamanan, dan kedaulatan suatu negara. Suradinata (2005 : 47) mengemukakan pengertian Ketahanan Nasional suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam potensi dan tantangan perlu memperkuat ketahanan

nasionalnya. Penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional menjadi landasan yang krusial dalam membangun fondasi yang kokoh untuk menjaga ketahanan nasional. *Rule of law* menjamin bahwa hukum berlaku adil dan sama untuk semua warga negara, serta mengatur tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, konstitusi nasional sebagai payung hukum tertinggi menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara, yang menjadi landasan bagi keberlangsungan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks globalisasi dan dinamika geopolitik yang terus berkembang, tantangan terhadap ketahanan nasional semakin beragam dan kompleks. Ancaman terorisme, radikalisme, konflik sosial, serta tantangan ekonomi dan lingkungan menjadi ujian bagi keberlangsungan negara. Dengan menerapkan *rule of law* dan konstitusi nasional yang kuat, suatu negara dapat memperkuat fondasi hukum dan kelembagaan untuk menghadapi tantangan tersebut. Penerapan prinsip-prinsip *rule of law* akan memastikan bahwa keadilan, kebebasan, dan keteraturan hukum menjadi pijakan utama dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Sementara itu, konstitusi nasional yang menjadi cerminan nilai-nilai dan aspirasi rakyat akan memberikan arah yang jelas dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh elemen masyarakat.

Penelitian ini menekankan bagaimana penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional dapat mempengaruhi pembangunan ketahanan nasional suatu negara. Dengan tujuan untuk mengeksplorasi pemahaman generasi muda terhadap konsep ketahanan nasional, *rule of law*, dan konstitusi nasional, serta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tersebut dapat memengaruhi sikap dan tindakan para elemen masyarakat dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Adapun Lailatusyaifa (2018) dan Fathihatun (2014) sama-sama menekankan pentingnya supremasi hukum dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hak konstitusional. Lailatusyaifa (2018) berpendapat perlunya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan pengaduan konstitusional, sedangkan Fathihatun (2014) membahas tidak sahnya penundaan pelaksanaan putusan Mahkamah. Studi-studi ini menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dan Konstitusi dalam menjamin ketahanan nasional. Namun Zulhidayat (2021) dan Fuad (2016) memberikan fokus yang lebih spesifik mengenai penerapan prinsip tersebut masing-masing dalam pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia dan hak hukum anak luar nikah. Studi-studi ini lebih jauh menyoroti implikasi praktis dari penegakan supremasi hukum dan Konstitusi dalam konteks tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada generasi muda tentang peran krusial *rule of law* dan konstitusi nasional dalam membangun fondasi

negara yang kuat dan berkelanjutan. Generasi muda, sebagai calon pemimpin masa depan, perlu membekali diri dengan kesadaran akan prinsip-prinsip hukum ini untuk memerangi korupsi, memperjuangkan keadilan, dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan pemahaman yang mumpuni tentang *rule of law* dan konstitusi nasional, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat ketahanan nasional melalui partisipasi aktif, kolaborasi lintas sektor, dan advokasi untuk prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini menjadi urgensi dalam membentuk pemimpin masa depan yang memiliki kesadaran hukum yang kuat dan mampu menjaga keutuhan negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional terbukti menjadi kunci dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh. Prinsip *rule of law* memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan mendorong stabilitas politik. Konstitusi nasional, di sisi lain memastikan pembagian kekuasaan yang seimbang, perlindungan hak-hak warga negara, dan penyelesaian sengketa yang adil. Memahami pentingnya penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional dalam membangun ketahanan nasional memungkinkan terciptanya negara yang kuat, stabil, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, penerapannya menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap negara untuk membangun ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan wawancara, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian Lexy J. Moleong (2005:6). Dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat menggali secara mendalam pandangan dan pemahaman responden terkait isu-isu hukum dan konstitusi yang menjadi landasan dalam membangun ketahanan nasional. Namun penelitian ini juga ditunjang dengan melakukan tinjauan pustaka atau *literature review*. Tinjauan Pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu kemudian menyatukannya untuk menarik kesimpulan (Mardis, 1999). Hasil gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya digunakan untuk menarik kesimpulan: (1) Menurutmu apa itu ketahanan nasional? apa pentingnya ketahanan nasional dalam menjaga keutuhan sebuah negara? (2) Apa peran atau langkah masyarakat dalam membangun ketahanan nasional? (3) Apa yang kamu ketahui tentang *rule of law*? dan mengapa *rule of law* penting dalam sebuah negara? (4) Apa yang dimaksud dengan konstitusi nasional? (5) Menurut kamu bagaimana hubungan *rule of law* dengan konstitusi nasional? (6) Bagaimana konstitusi nasional mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara?. Metode analisis isi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh

inferensi yang valid dan dapat diperiksa kembali sesuai dengan konteksnya (Krippendoff,1993).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Responden Terhadap penerapan *Rule Of Law* dan Konstitusi Nasional dalam Membangun Ketahanan Nasional

Hasil wawancara memberikan gambaran yang kaya dan komprehensif tentang bagaimana generasi muda memandang peran *rule of law* dan konstitusi nasional dalam konteks ketahanan nasional suatu negara. Saat pelaksanaan wawancara kepada responden, terdapat beberapa mahasiswa dan siswa SMA yang tertarik dengan konteks pertanyaan yang disajikan serta mampu menjawab sesuai pemahaman masing-masing. Namun ada juga mahasiswa dan siswa SMA yang kurang paham bahkan tidak tertarik untuk di wawancara karena mereka merasa kurangnya pemahaman terhadap penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional dalam membangun ketahanan nasional. Dua hal yang disorot dalam aktivitas wawancara ini adalah pertama, banyaknya dari mereka yang tidak pernah mendengar kata “*Rule Of Law*” kedua, beberapa dari mereka mengetahui makna *rule of law* namun tidak dapat mengungkapkan pemikiran mereka. Setelah kami menjelaskan makna dari kata *rule of law*, mereka mulai mengetahui makna dari kata *rule of law* dan mampu mengungkapkan sesuai yang mereka pahami saat di wawancara.

Dengan demikian, melalui metode kualitatif dan pengalaman wawancara yang mendalam, pembahasan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana generasi muda memandang, mengalami, dan memperjuangkan penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional dalam membangun ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Dengan melibatkan 18 responden dari kalangan mahasiswa dan siswa, peneliti menggunakan wawancara sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap topik yang diteliti. Dalam proses wawancara, responden memberikan insight yang berharga terkait pentingnya penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional dalam membangun ketahanan nasional. Mereka menyoroti bagaimana pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum tersebut dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa pengetahuan tentang *rule of law* dan konstitusi nasional sangat penting, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka percaya bahwa melalui pemahaman yang baik terhadap konstitusi, generasi muda dapat menghindari perilaku koruptif dan memperjuangkan keadilan serta

transparansi dalam pemerintahan. Dalam pengalaman wawancara, responden menekankan pentingnya partisipasi aktif generasi muda dalam mempromosikan prinsip-prinsip *rule of law* dan konstitusi nasional. Mereka merasa bahwa sebagai agen perubahan, siswa dan mahasiswa memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, dan transparansi dalam masyarakat. Pandangan responden juga menyoroti kolaborasi yang diperlukan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip *rule of law* dan konstitusi nasional. Mereka percaya bahwa kolaborasi ini akan memperkuat implementasi prinsip-prinsip tersebut dan membangun ketahanan nasional yang kokoh.

Sumber Dalam Sistem Pemerintahan Guna Membangun Indonesia Maju

Ketahanan nasional, *rule of law*, dan konstitusi nasional adalah tiga konsep yang terkait dengan sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang memuat keuletan dan ketahanan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari luar maupun dalam negeri yang dapat merugikan keutuhan, jati diri, kelangsungan hidup bangsa, dan perjuangan mencapai tujuan nasional Indonesia.

Sebaliknya, *rule of law* adalah asas yang menjamin supremasi hukum dalam suatu negara, dengan menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak mempunyai kewenangan di luar hukum. Konsep supremasi hukum didasarkan pada gagasan bahwa semua warga negara dan lembaga bertanggung jawab terhadap hukum yang sama, dan kadang-kadang dinyatakan sebagai "*tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum*". Di Indonesia, negara hukum dianut sebagai sebuah konsep negara hukum dimana hukum memegang kedudukan tertinggi dalam pemerintahan negara, dan merupakan bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, serta menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Konstitusi nasional, dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi lebih luas daripada UUD dan tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut beberapa ahli, ada tiga pengertian konstitusi, yaitu: (1) Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. (2) Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat dan (3) Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi nasional berperan sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara dan berisi prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, konstitusi nasional berperan sebagai landasan hukum bagi pemerintahan dan berisi prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Dalam sintesis, ketahanan nasional, *rule of law*, dan konstitusi nasional adalah tiga konsep yang terkait dengan sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Ketahanan nasional berfokus pada kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. *Rule of law* berfokus pada supremasi hukum dalam suatu negara dan perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat. Konstitusi nasional berfokus pada sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, ketiga konsep ini berperan sebagai landasan hukum bagi pemerintahan dan berisi prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Etnisitas dan Kearifan Lokal dalam Pembentukan Karakter Generasi Milenial, berkaitan juga dengan konteks pembangunan karakter bangsa. Pembentukan karakter generasi milenial yang kuat dan berakar pada nilai-nilai lokal juga merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat identitas nasional dan menjaga keutuhan negara sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi yang berlaku dalam (Maulia D. Kembara, dkk, 2021).

Upaya Pelajar Dalam Membangun Ketahanan Nasional Melalui Penerapan Rule Of Law dan Konstitusi Nasional

- a. Peningkatan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama siswa dan mahasiswa, tentang pentingnya *rule of law* dan konstitusi nasional. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, diskusi, seminar, dan kampanye pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip ini.
- b. Partisipasi Aktif: Siswa dan mahasiswa harus didorong untuk terlibat dalam gerakan advokasi dan kegiatan sosial yang mempromosikan *rule of law* dan konstitusi nasional. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat dengan memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan transparansi.

- c. Kolaborasi: Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam menerapkan *rule of law* dan konstitusi nasional. Kolaborasi ini akan memperkuat implementasi prinsip-prinsip ini dan membangun ketahanan nasional yang kokoh.

SIMPULAN

"Membangun ketahanan nasional melalui penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional" membahas pentingnya penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. *Rule of law* memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan mendorong stabilitas politik dengan menekankan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Konstitusi Nasional, sebagai landasan hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara, memastikan pembagian kekuasaan yang seimbang dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa pengetahuan tentang *rule of law* dan konstitusi nasional sangat penting, terutama bagi generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Generasi muda diharapkan dapat menghindari perilaku koruptif, memperjuangkan keadilan, dan transparansi dalam pemerintahan melalui pemahaman yang baik terhadap konstitusi. Partisipasi aktif generasi muda dalam mempromosikan prinsip-prinsip *rule of law* dan konstitusi nasional dianggap krusial untuk membangun ketahanan nasional yang kuat. Dalam konteks kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, implementasi prinsip-prinsip *rule of law* dan konstitusi nasional diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional. Melalui pemahaman mendalam generasi muda terhadap isu hukum dan konstitusi, artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana *rule of law* dan konstitusi nasional dapat menjadi pilar dalam membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dengan kesadaran masyarakat yang meningkat, partisipasi aktif siswa dan mahasiswa, serta kolaborasi lintas sektor, diharapkan negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warga negaranya. Berdasarkan penjelasan dari siswa dan mahasiswa dalam wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional memiliki peran yang penting dalam membangun ketahanan nasional. *Rule of law* sebagai prinsip hukum yang menjamin keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta konstitusi nasional sebagai landasan hukum yang mengatur tata kelola negara dan memberikan hak-hak dasar kepada warga negara, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak warga negara.

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip *rule of law* dan konstitusi nasional menjadi kunci dalam memastikan bahwa negara memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Melalui kesadaran akan pentingnya penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berdaya. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip ini akan memperkuat ketahanan nasional dan menjaga keutuhan negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Saran dan Ucapan Terima Kasih

Saran ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan peran aktif generasi muda untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penerapan *rule of law* dan konstitusi nasional yang lebih baik lagi dengan tiga hal utama yaitu: Peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif siswa dan mahasiswa, serta kolaborasi bagi semua pihak. Terima kasih yang tulus kepada semua orang yang membantu penelitian dan penyusunan karya ini, dengan harapan bahwa konsep yang dibahas dapat menginspirasi pembaca untuk berpikir kritis dan mengambil tindakan konstruktif. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menyumbangkan pendapat, pengalaman, dan pengetahuan mereka untuk menjadikan halaman ini sumber informasi yang berharga dan berwawasan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. A. (2015). Urgensi ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. *Jurnal Integrasi*, 1(2), 247-257.
- Azizah Putri, N. N., & dkk. (2023). Peran Pancasila sebagai upaya membangun etika anak berkebutuhan khusus di masyarakat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 89-96.
- Billah, H. U. (2023). Kesadaran berpancasila dalam mempertahankan identitas nasional. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 113-121.
- Fathihatun, N. (2014). Konstitusionalitas penundaan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PPU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-X1/2013).
- Fuad, H. (2016). Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 oleh hakim perspektif penemuan hukum: Studi kasus No: 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg.
- Ghoffar, A. B. (n.d.). Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia.

- Ginting, I. H. (2013, April 11). Globalisasi dan ketahanan nasional. Kompasiana.com.
- Hidayat, J. (2023, February 28). Ketahanan nasional Indonesia di era globalisasi. Binus.ac.id.
- Jannah, H. M., & dkk. (2023). Korelasi penegakkan etika Pancasila dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di kampus. Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 1(2), 76-88.
- Kembara, M. D., & dkk. (2021). Etnisitas dan kearifan lokal: Penerapan nilai-nilai budaya Sunda dalam pembentukan karakter generasi milenial. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 9(1), 1-17.
- Lailatusyaifa, S. U. (n.d.). Pelaksanaan kewenangan pengaduan konstitusional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai kebutuhan teoritik dan empiris.
- Mugasejati, N. P., & Armawi, A. (2000). Ketahanan nasional dan globalisasi; sebuah agenda riset. Jurnal Ketahanan Nasional, 5(3), 43-60.
- Pitaloca, D., & dkk. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat. Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 1(2), 97-105.
- Putra, T. M. (2019). Pelayanan publik, good governance, dan ketahanan nasional. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sari, A. M. (2023, September 20). Rule of law: Pengertian, tujuan dan prinsipnya. Fahum.umsu.ac.id.
- Yanuar, G. F., & dkk. (2023). Pengetahuan pelajar tentang nilai-nilai Pancasila untuk mempertahankan ideologi negara. Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 1(1), 55-69.
- Zulhidayat, M. (2021). Anomali pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) melalui Pilpres No. 112 Tahun 2020.